

## BAB 4

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Responden Penelitian

Responden Penelitian terdiri dari 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan siapa saja yang menurut peneliti pantas dimasukkan ke dalam penelitian dari total 100 responden dengan memperhatikan stratifikasi penghasilan yang dihitung berdasarkan PTKP OP (Penghasilan Tidak Kena Pajak Orang Pribadi) menurut UU PPh Pasal 7.

PTKP OP dijadikan dasar stratifikasi karena merupakan biaya hidup yang diperkenankan UU PPh (Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) untuk dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Semakin penghasilan Wajib Pajak melebihi PTKP OP maka semakin besar bagian dari penghasilannya yang akan diinvestasikan menjadi kekayaannya. Bila Kekayaan Wajib Pajak tersebut berupa tanah dan bangunan maka akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rincian klasifikasi responden berdasarkan stratifikasi pendapatan dijelaskan pada tabel 4.1.

**Tabel. 4.1. Klasifikasi Responden berdasarkan Stratifikasi Pendapatan**

<b>PENGHASILAN WP (RATA-RATA PER BULAN)</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Di bawah PTKP WP OP (UU PPh psl 17)</b>		
Di bawah Rp. 750.000	14	14,0%
Rp.750.000 s/d Rp. 1.320.000,-	16	16,0%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>30,0%</b>
<b>Di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya</b>		
Rp. 1.320.000, s/d Rp. 2.500.000,-	20	20,0%
Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.960.000,-	20	20,0%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40,0%</b>
<b>Di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP</b>		
Rp. 3.960.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	20	20,0%
Di atas Rp. 10.000.000,-	10	10,0%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>30%</b>
<b>Total Seluruh Responden</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Kuisioner disebar kepada responden yang bertempat tinggal di beberapa kecamatan di wilayah Kota Madya Jakarta Selatan yaitu Kecamatan Mampang-Parapatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak dan kecamatan lain sekitarnya. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut karena tingginya peralihan perubahan peruntukan hunian dari zona pemukiman menjadi zona komersial yang akhirnya menimbulkan kenaikan nilai jual tanah secara tajam (Republika, 14 Oktober 2001; Viva News 27 Maret 2010; Pelita, 9 Februari 2010). Sedangkan Kecamatan Pesanggrahan dan sekitarnya dipilih karena pengoperasian akses tol Ulujami – Bintaro yang menimbulkan kenaikan harga tanah di kawasan sekitar jalan tol tersebut sepanjang tahun 2007-2009 (RumahDanProperti.com, 18 Januari 2010).

Sebanyak 61% responden bertempat tinggal di kawasan Kebayoran Baru dan Mampang Prapatan yang dikelilingi jalan-jalan protokol yang akan diresmikan sebagai kawasan bisnis baru yaitu Jl. Wolter Monginsi, Jl. Senopati, Jl. Tendean, Jl. Kemang Raya dan Jl. Pangeran Antasari. Sebanyak 21% responden bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Minggu, Pancoran dan Tebet yang dikelilingi jalan protokol dipenuhi gedung perkantoran yaitu Jl. MT. Haryono dan Jl Raya Pasar Minggu. Sebanyak 12% responden bertempat tinggal di Kecamatan Pesanggrahan dan Kebayoran lama yang mendapat akses jalan tol baru Bintaro-Ulujami. Sisanya 4% responden tinggal di Cilandak dan Jagakarsa yang dikelilingi jalan protokol dipenuhi gedung perkantoran yaitu Jl. Pangeran Antasari dan Jl. TB. Simatupang. Rincian lokasi tempat tinggal responden dijelaskan secara rinci dalam tabel 4.2.

**Tabel. 4.2 Lokasi Tempat Tinggal Responden**

LOKASI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN					
Kecamatan	Jumlah	%	Kelurahan	Jumlah	%
Kebayoran Baru	32	32,0%	Petogogan	30	30,0%
			Cipete Utara	1	1,0%
			Rawa Barat	1	1,0%
Mampang Prapatan	29	29,0%	Mampang Prapatan	11	11,0%
			Pela Mampang	17	17,0%
			Kuningan Barat	1	1,0%
Pancoran & Tebet	9	9,0%	Kalibata	3	3,0%
			Duren Tiga	5	5,0%
			Tebet Timur	1	1,0%

LOKASI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN					
Kecamatan	Jumlah	%	Kelurahan	Jumlah	%
Pasar Minggu	12	12,0%	Pejaten Timur	2	2,0%
			Pejaten Barat	3	3,0%
			Ragunan	1	1,0%
			Jatipadang	2	2,0%
			Pasar Minggu	4	4,0%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	14	14,0%	Bintaro	5	5,0%
			Ulujami	8	8,0%
			Grogol Selatan	1	1,0%
Cilandak & Jagakarsa	4	4,0%	Pondok labu	1	1,0%
			Cipete Selatan	1	1,0%
			Cilandak Barat	1	1,0%
			Srengseng Sawah	1	1,0%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Tabel. 4.3. Rincian Data Responden

PROFIL RESPONDEN					
	Jumlah	%		Jumlah	%
			<b>Latar Belakang</b>		
<b>Jenis Kelamin</b>			SD/SMP	27	27,0%
Pria	57	57,0%	SMA	36	36,0%
Wanita	43	43,0%	Diploma	15	15,0%
			S1	15	15,0%
			S2	4	4,0%
			S3	3	3,0%
<b>Usia</b>					
Kurang dari 25 tahun	2	2,0%	<b>Pekerjaan</b>		
26-35 tahun	20	20,0%	Pegawai Swasta	31	31,0%
36-45 tahun	21	21,0%	Ibu Rumah Tangga	23	23,0%
46-55 tahun	28	28,0%	Wirausaha	22	22,0%
Lebih dari 55 tahun	29	29,0%	Bekerja Serabutan	12	12,0%
			Pensiunan	7	7,0%
			Pegawai Negeri	3	3,0%
			Pengangguran	2	2,0%

Kuisioner disebar dengan hanya memperhatikan tingkat penghasilan gabungan penghuni rumah Wajib Pajak dan wilayah Objek Pajak yang ditinggali Wajib Pajak. Karena itulah, responden terdiri dari berbagai usia, latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang dirinci pada tabel 4.3. Terdapat 23 orang

responden ibu rumah tangga, 12 orang pekerja serabutan, 7 orang responden yang sudah pensiun dan 2 orang yang menganggur. 6 dari 23 orang responden ibu rumah tangga telah berusia lebih dari 55 tahun dan suami mereka juga sudah pensiun ataupun tidak berpenghasilan tetap lagi namun sisanya 17 orang memiliki suami yang masih aktif bekerja. Responden pekerja serabutan adalah pengangguran musiman non akademis (latar belakang SD/SMP dan SMA) yang bekerja hanya pada saat-saat tertentu saja yaitu pekerja proyek bangunan dengan upah harian. Responden pensiunan berusia lebih dari 55 tahun dan mendapatkan penghasilan dari uang pensiun ataupun biaya hidupnya dibiayai dari penghasilan anggota keluarga lainnya. Responden yang menganggur adalah pengangguran akademis (latar belakang sarjana dan diploma) dan biaya hidupnya dibiayai dari penghasilan anggota keluarga lainnya.

## **4.2. Analisis Statistika Data Kuesioner**

### **4.2.1. Analisis Data Objek Pajak**

Objek Pajak yang diteliti adalah tempat tinggal responden berupa bangunan rumah dan tanah yang merupakan Objek Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dibayar oleh responden ataupun penghuni tempat tinggal responden lainnya. Sebanyak 73% Objek Pajak ditinggali sejak sebelum tahun 1990 dan 39% direnovasi besar-besaran. Hal ini menunjukkan mayoritas Objek Pajak bangunan adalah bangunan yang cukup tua. Sebanyak 42% Objek Pajak diperoleh dari warisan dan sebanyak 77% bangunan digunakan hanya sebagai tempat tinggal sehingga kenaikan NJOP tidak dapat dikaitkan langsung dengan kemampuan ekonomis penghuni tempat tinggal tersebut. Sebanyak 8% Objek Pajak tidak dimiliki oleh penghuni rumah oleh yang bersangkutan yaitu 5% merupakan rumah dinas dan 2% diperoleh dari menyewa serta 1% merupakan tanah garapan. Walaupun objek PBB tidak dimiliki penghuni rumah, PBB tetap dibayar oleh penghuni rumah bukan oleh pihak lainnya. Terdapat 11% Objek Pajak yang belum disertifikasi dan 5% masih dalam proses ataupun tidak diketahui sertifikatnya. Tidak adanya sertifikat ini akan mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga nilainya menjadi lebih rendah bila dibandingkan

dengan rumah yang memiliki sertifikat tanah seperti yang dikemukakan Sidik (2000). Rincian data profil Objek Pajak dijelaskan pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Profil Objek Pajak**

<b>PROFIL OBJEK PAJAK</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Sertifikasi Tanah</b>		
Ya	84	84,0%
Tidak	11	11,0%
Dalam Proses	4	4,0%
Tidak Tahu	1	1,0%
<b>Ditinggali sejak</b>		
Sebelum 1970	33	33,0%
1970-1979	17	17,0%
1980-1989	23	23,0%
1990-1999	17	17,0%
2000-2007	6	6,0%
Sesudah 2007	4	4,0%
<b>Rumah Dijaminkan</b>		
Ya	1	1,0%
Tidak	98	98,0%
Tidak tahu	1	1,0%
<b>Diperoleh dari</b>		
Warisan	42	42,0%
Pembelian tunai	47	47,0%
Rumah Dinas	5	5,0%
Menyewa	2	2,0%
KPR/ Kredit Perumahan	2	2,0%
Tanah Garapan	1	1,0%
Tidak tahu	1	1,0%
<b>Fungsi rumah</b>		
Hanya sebagai rumah	77	77,0%
Rumah dan persewaan	13	13,0%
Rumah dan warung/toko	7	7,0%
Rumah dan kantor	2	2,0%
Rumah dan bengkel	1	1,0%
<b>Renovasi</b>		
Ya, renovasi besar-besaran (Di atas Rp. 10 Juta)	39	39,0%
Ya, renovasi biasa (Rp. 4 Juta s/d Rp. 10 Juta)	8	8,0%
Perbaikan rutin biasa (Di bawah Rp. 4 Juta)	23	23,0%
Tidak ada renovasi	30	30,0%

**Tabel 4.5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per Kecamatan**

<b>(Dalam rupiah)</b> <b>Kecamatan</b>	<b>NJOP per 2009</b>		<b>Koefisien Standar Deviasi (Standar Deviasi dibagi Mean)</b>
	<b>Mean (Rata-Rata)</b>	<b>Median (Nilai Tengah)</b>	
Kebayoran Baru	1.839.062.500	700.000.000	128,61%
Mampang Prapatan	433.620.690	175.000.000	293,80%
Pancoran & Tebet	722.222.222	700.000.000	68,87%
Pasar Minggu	2.797.916.667	3.000.000.000	79,61%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	917.857.143	700.000.000	81,32%
Cilandak & Jagakarsa	112.500.000	112.500.000	64,15%
<b>Seluruh Wilayah</b>	<b>1.248.000.000</b>	<b>512.500.000</b>	<b>150,89%</b>

Rata-rata (*mean*) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bervariasi pada tiap kecamatan seperti pada rincian data NJOP dari Objek Pajak yang ditinggali responden pada tabel 4.5. Secara keseluruhan wilayah, terjadi kesenjangan NJOP yang cukup besar yang terlihat dari koefisien standar deviasi 150,89%.

Kesenjangan NJOP yang paling mencolok terdapat pada kecamatan Kebayoran Baru dan Mampang Prapatan dimana terdapat koefisien standar deviasi yang cukup besar (128,6% dan 293,8%). Pada kecamatan Kebayoran baru, rata-rata NJOP senilai Rp. 1,84 Milyar berbeda sekali dengan nilai mediannya yang hanya Rp. 700 Juta. Demikian pula dengan kecamatan Mampang Prapatan, rata-rata NJOP senilai Rp. 433,6 Juta sangat berbeda dengan nilai mediannya yang hanya Rp. 175 Juta.

Kesenjangan NJOP ini terjadi karena sebagian lokasi dari kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kawasan banjir dengan pemukiman padat penduduk yang berhimpitan di gang sempit sehingga mempengaruhi penilaian harga jual tanah dan bangunan di lokasi tersebut menjadi lebih murah daripada lokasi di sekitarnya seperti yang dikemukakan Sidik (2000). Lokasi tersebut pada Kecamatan Kebayoran Baru adalah yaitu di Jalan Bangka, Jalan Wijaya I dan Jalan Wijaya Timur (Kelurahan Petogongan) yang memiliki NJOP rata-rata di bawah Rp. 250 Juta dari rata-rata NJOP kecamatan Rp. 1,84 Milyar. Pada Kecamatan Mampang Prapatan berada di Jalan Bangka, Jalan Bangka II, Jl Bangka Raya dan jalan-jalan lain di Kelurahan Pela Mampang yang memiliki

NJOP rata-rata di bawah Rp. 100 Juta dari rata-rata NJOP kecamatan Rp. 433 Juta.

Kecamatan Pasar Minggu dan Kebayoran Baru memiliki rata-rata NJOP tertinggi (Rp. 2,79 Milyar dan Rp. 1,84 Milyar) karena kedua kecamatan ini dikelilingi jalan-jalan protokol yang memiliki banyak gedung perkantoran. Berbeda dengan kecamatan Kebayoran Baru, kecamatan Pasar Minggu memiliki median yang paling tinggi yaitu Rp. 3 Milyar dan koefisien standar deviasi yang rendah sebesar 79,61%. Hal ini menunjukkan NJOP di kecamatan Pasar Minggu tidak terlalu memiliki kesenjangan antara satu rumah dengan lainnya seperti yang terjadi di kecamatan Kebayoran Baru. Sebanyak 46,7% Objek Pajak pada kecamatan Kebayoran Baru memiliki NJOP di atas Rp. 2 Milyar yang terletak di Jl. Cibulan, Jl Cililin dan sekitarnya. Jalan-jalan ini bermuara pada Jl. Wolter Monginsidi yang merupakan akses menuju kawasan niaga Blok M, Kuningan dan Sudirman. Pada kecamatan Pasar Minggu, 75% Objek Pajak memiliki NJOP di atas Rp. 2 Milyar berada di kelurahan Pasar Minggu dan Pejaten Barat. Selain dekat dengan jalan-jalan protokol (Jl. Raya Pasar Minggu dan Jl. Warung Jati Barat), perumahan di kawasan ini terkenal sebagai perumahan mewah dengan ukuran rumah yang luas dan besar.

#### 4.2.2. Analisis Data Variabel PBB ( $\hat{Y}_1$ )

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilambangkan oleh  $\hat{Y}_1$  merupakan nilai rata-rata dari PBB terutang selama 3 tahun sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2007 hingga 2009. Variabel ini akan diuji korelasinya dengan variabel Kekayaan Bersih (dilambangkan oleh  $X_{1.1}$ ) dan Penghasilan Bersih (dilambangkan oleh  $X_{1.2}$ ) dalam penelitian ini.

Pada tabel 4.6, dapat kita lihat bahwa rata-rata (*mean*) tagihan PBB tiap kecamatan bervariasi sesuai dengan variasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Wilayah Kebayoran Baru dan Pasar Minggu memiliki rata-rata tagihan PBB terbesar. Kesenjangan nilai PBB yang sama dengan kesenjangan rata-rata NJOP terjadi di Mampang Prapatan dan Kebayoran Baru (koefisien standar deviasi 267,01% dan 120,36%). Pada kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama terjadi

kesenjangan nilai PBB yang cukup besar (koefisien standar deviasi 123,28%) yang berbeda dengan kesenjangan rata-rata NJOP yang koefisien standar deviasinya hanya 81,32%. Kesenjangan nilai rata-rata PBB ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaruh NJOPTKP (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak) dan perbedaan tarif Dasar Pengenaan Pajak yang lebih tinggi (40%) untuk bangunan di atas Rp 1 Milyar dalam perhitungan PBB terutang (KMK No. 201/KMK.04/2000 dan PP No. 25 Tahun 2002). Kesenjangan ini dapat pula terjadi karena NJOP yang dipakai hanyalah NJOP per tahun 2009 sedangkan nilai rata-rata PBB yang dipakai adalah rata-rata dari 3 tahun pajak yaitu tahun pajak 2007, 2008 dan 2009. Terdapat 26,57% Objek Pajak di kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama yang memiliki NJOP per tahun 2009 di atas Rp. 1 Milyar namun hanya 1 responden yang membayar rata-rata PBB dari tahun 2007-2009 lebih dari Rp. 1 Juta. Perbedaan ini terjadi karena kenaikan PBB akibat kenaikan NJOP dari tahun pajak 2007-2009 pada tempat tinggal dari 6 responden (42,8% dari responden kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama).

**Tabel 4.6. Rata-rata tagihan PBB per Kecamatan**

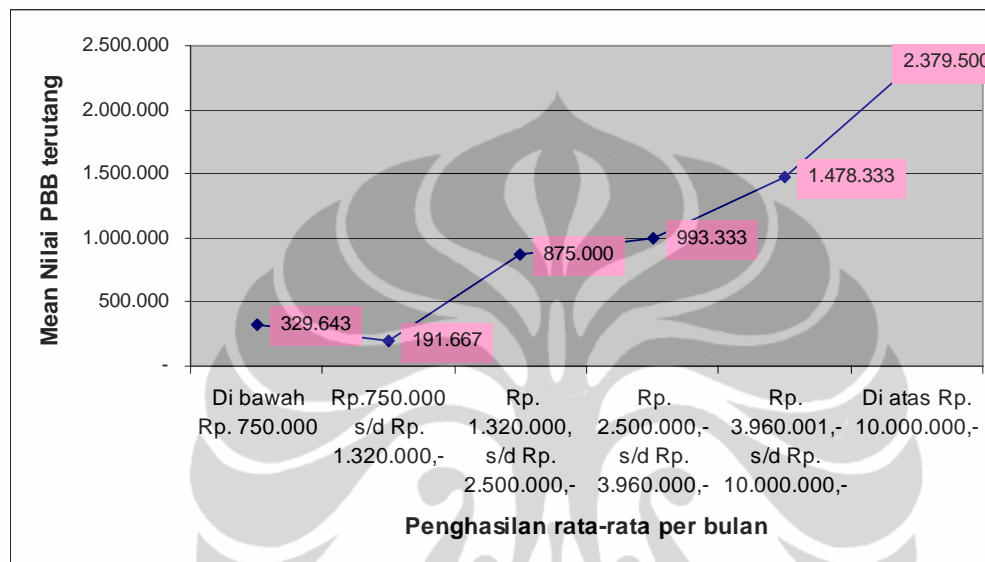
(Dalam rupiah)	Rata-rata tagihan PBB 2007-2009		
	Mean (Rata-Rata)	Median (Nilai Tengah)	Koefisien Standar Deviasi (Standar Deviasi dibagi Mean)
<b>Kecamatan</b>			
Kebayoran Baru	1.193.229	700.000	120,36%
Mampang Prapatan	384.138	175.000	267,01%
Pancoran & Tebet	520.370	325.000	62,56%
Pasar Minggu	2.909.722	2.250.000	89,70%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	579.405	325.000	123,28%
Cilandak & Jagakarsa	343.750	250.000	72,09%
<b>Seluruh Wilayah</b>	984.100	325.000	157,62%

Pada grafik dalam Gambar 4.1, dapat kita lihat bahwa grafik jumlah PBB yang terutang naik seiring dengan kenaikan tingkat penghasilan rata-rata per bulan gabungan para penghuni tempat tinggal responden (penghasilan kotor yang belum dikurangi biaya-biaya). Untuk golongan penghasilan terbawah (golongan penghasilan di bawah Rp. 750.000,- dan golongan Rp. 750.001, s/d Rp. 1.320.000,-) memiliki rata-rata PBB terhutang di bawah Rp. 350.000,- dan untuk



golongan penghasilan teratas (golongan di atas Rp. 10.000.000,-) memiliki rata-rata PBB terhutang di atas Rp. 2 Juta. Bila tidak melihat faktor biaya dan rasio beban PBB terhadap penghasilan, terlihat bahwa PBB progresif ditinjau dari tingkat penghasilan rata-rata per bulan.

**Gambar 4.1. Grafik Rata-rata (Mean) Nilai PBB Terhutang ditinjau dari Penghasilan rata-rata per bulan**



#### 4.2.3. Analisis Data Variabel Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ) dan Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih ( $X_{2.1}$ )

Variabel Kekayaan Bersih (dilambangkan oleh  $X_{1.1}$ ) merupakan nilai taksiran aset yang dimiliki Wajib Pajak (seperti aset keuangan, tanah dan bangunan, simpanan di bank, kendaraan, emas, barang berharga, dll) dikurangi nilai utang Wajib Pajak yang ditanggung Wajib Pajak (termasuk utang kartu kredit, kredit kendaraan, KPR (kredit rumah), dan utang lain-lain). Variabel Rasio Nilai PBB yang terhutang terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak (dilambangkan oleh  $X_{2.1}$ ) adalah nilai rata-rata dari PBB terhutang selama 3 tahun sesuai SPPT PBB untuk Tahun Pajak 2007 hingga 2009 ( $\hat{Y}_1$ ) dibagi total Kekayaan Bersih Wajib Pajak ( $X_{1.1}$ ) pada akhir tahun.

Pada tabel 4.7, dapat kita lihat bahwa terdapat kesenjangan kepemilikan harta di antara responden dari koefisien standar deviasi 180,9%. Kesenjangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Mampang Prapatan dengan nilai koefisien

standar deviasi 373,2% yang disebabkan seorang responden berpenghasilan per bulan di atas Rp. 10 Juta yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut memiliki harta berupa emas dan kendaraan di atas Rp. 20 Milyar dan seorang responden yang tempat tinggalnya memiliki NJOP di atas Rp. 4 Milyar, paling tinggi dari NJOP seluruh kecamatan yang nilai rata-ratanya hanya Rp. 433 Juta. Kesenjangan nilai harta yang besar juga ditemukan di kecamatan Kebayoran Baru sebesar 163,1% yang selain disebabkan oleh kesenjangan NJOP di kecamatan itu juga karena perbedaan mencolok dari nilai harta lain dari golongan dengan penghasilan per bulan di atas Rp. 10 Juta yang tidak dimiliki responden lainnya. Sebanyak 3 orang responden dari golongan tersebut memiliki harta lain seperti emas, kendaraan, saham dan bagian firma yang nilainya berkisar antara Rp. 4 Milyar s/d Rp. 10 Milyar.

**Tabel 4.7. Total Harta Wajib Pajak per Kecamatan**

(Dalam rupiah)	Total Harta Wajib Pajak		
	Mean (Rata-Rata)	Median (Nilai Tengah)	Koefisien Standar Deviasi (Standar Deviasi dibagi Mean)
<b>Kecamatan</b>			
Kebayoran Baru	3.029.687.500	800.000.000	163,1%
Mampang Prapatan	1.413.965.517	175.000.000	373,2%
Pancoran & Tebet	3.061.111.111	1.400.000.000	114,9%
Pasar Minggu	11.810.416.667	11.150.000.000	74,5%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	1.830.357.143	775.000.000	141,9%
Cilandak & Jagakarsa	287.500.000	175.000.000	96,4%
<b>Seluruh Wilayah</b>	3.340.050.000	700.000.000	180,9%

Pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa rata-rata (mean) nilai PBB ( $\hat{Y}_1$ ) untuk seluruh responden (kolom 1) adalah Rp. 984.100,-; rata-rata nilai harta untuk seluruh responden (kolom 2) adalah Rp. 3.340.050.000,-; dan rata-rata nilai hutang untuk seluruh responden (kolom 3) adalah Rp. 18.340.000,-. Dari perhitungan rata-rata nilai harta dikurangi rata-rata nilai utang untuk seluruh responden (kolom 4) diperoleh rata-rata nilai Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ) sebesar Rp. 3.321.710.000,-. Dari perhitungan rata-rata nilai PBB dibagi dengan nilai Kekayaan Bersih (kolom 6) dihasilkan rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih

(X<sub>2.1</sub>) sebesar 0,03% yang jumlahnya sama dengan rasio PBB terhadap harta tanpa dikurangi utang (kolom 5). Hal ini menunjukkan pengaruh nilai utang terhadap rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) kurang signifikan.

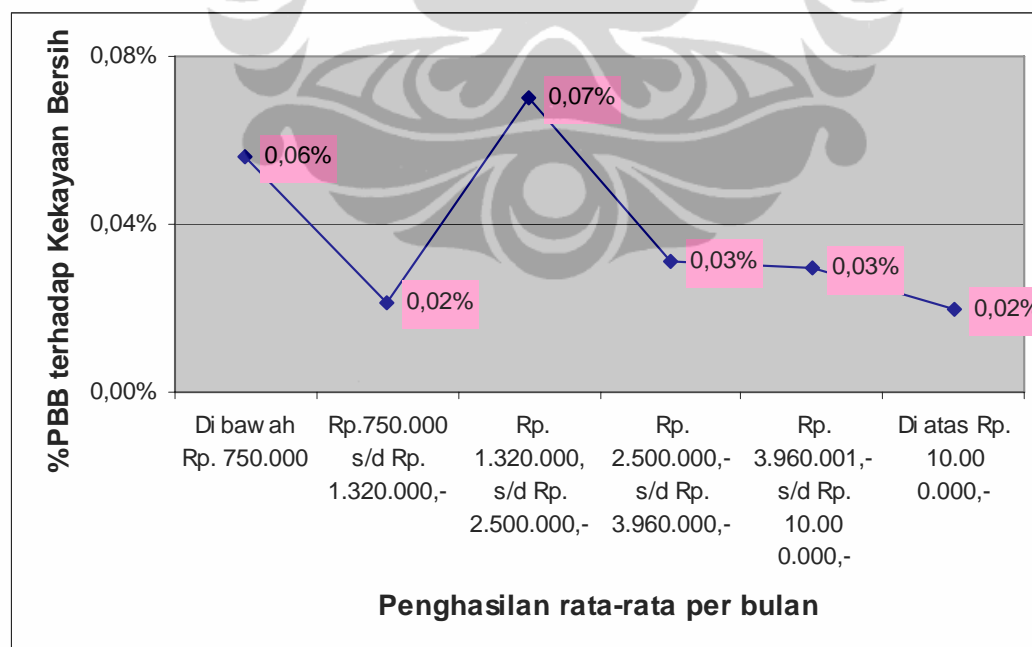
**Tabel. 4.8. Perhitungan Kekayaan Bersih (X<sub>1.1</sub>) dan dan Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) ditinjau dari Penghasilan rata-rata per bulan**

	(1)	(2)	(3)
<b>Penghasilan WP (rata-rata per bulan)</b>	<b>Mean Nilai PBB</b>	<b>Mean Nilai Harta</b>	<b>Mean Nilai Utang</b>
<b>Di bawah PTKP WP OP (UU Pph psl 17)</b>	260.655	745.424.107	2.470.982
<b>Di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya</b>	934.167	2.230.125.000	3.643.750
<b>Di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP</b>	1.928.917	8.576.250.000	58.093.750
<b>Total Seluruh Responden</b>	984.100	3.340.050.000	18.340.000
	(4) = (2) - (3)	(5) = (1)/(2)	(6) = (1)/(4)
<b>Penghasilan WP (rata-rata per bulan)</b>	<b>Mean Kekayaan Bersih</b>	<b>%PBB terhadap Harta</b>	<b>%PBB terhadap Kekayaan Bersih</b>
<b>Di bawah PTKP WP OP (UU Pph psl 17)</b>	742.953.125	0,03%	0,04%
<b>Di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya</b>	2.226.481.250	0,04%	0,04%
<b>Di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP</b>	8.518.156.250	0,02%	0,02%
<b>Total rata-rata Seluruh Responden</b>	3.321.710.000	0,03%	0,03%

Berdasarkan tabel 4.8, dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan rata-rata per bulan dari para responden, semakin tinggi nilai PBB terhutang (kolom 1) dan semakin besar pula nilai hartanya (kolom 2) dan kekayaan bersihnya (kolom 4). Golongan dengan penghasilan per bulan di bawah PTKP OP (di bawah Rp. 1.320.000,-) memiliki nilai Kekayaan Bersih sebesar Rp. 742.953.125 (22,32% dari rata-rata Kekayaan Bersih seluruh responden)

sedangkan golongan dengan penghasilan per bulan di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP (di atas Rp. 3.960.000,-) memiliki nilai Kekayaan Bersih sebesar Rp. 8.518.156.250 (256,8% dari rata-rata Kekayaan Bersih seluruh responden). Bila dilihat dari Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (kolom 6), nilai rasio di antara berbagai tingkat penghasilan tidak berbeda jauh dari rata-rata rasio seluruh responden 0,03%. Golongan dengan penghasilan per bulan di bawah PTKP OP (di bawah Rp. 1.320.000,-) dan golongan dengan penghasilan di atas PTKP WP OP (di bawah Rp. 1.320.001,- s/d p. 3.960.000,-) memiliki nilai Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih yang sama yaitu sebesar 0,04%. Golongan penghasilan teratas yaitu golongan dengan penghasilan di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP (di atas Rp. 3.960.000,-) justru memiliki nilai Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih yang lebih kecil yaitu sebesar 0,02%. Hal ini tidak sesuai dengan rata-rata nilai Kekayaan Bersih yang terus meningkat seiring dengan tingkat penghasilan rata-rata per bulan dari para responden.

**Gambar. 4.2. Grafik Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) ditinjau dari Penghasilan rata-rata per bulan**



Hampir sama dengan pengamatan pada tabel 4.8, pada grafik dalam gambar 4.2, terlihat bahwa Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) cenderung stagnan terlihat dari nilainya yang hanya berkisar antara 0,02% hingga

0,07%. Pergerakan grafiknya tidak teratur ditinjau dari tingkat penghasilan rata-rata per bulan. Dari 0,06% turun ke 0,02% naik lagi menjadi 0,07% turun lagi menjadi 0,03% dan akhirnya turun lagi secara perlahan menjadi 0,02%. Berdasarkan grafik ini sulit disimpulkan hubungan antara Rasio PBB terhadap Kekayaan bersih dan tingkat Penghasilan rata-rata per bulan. Dari gambar 4.2 ini terdapat indikasi ketidakadilan vertikal karena golongan dengan penghasilan per bulan paling kecil (di bawah Rp. 750.000,-) menanggung beban pajak 0,06%. Nilai ini lebih besar dari beban pajak yang ditanggung golongan dengan penghasilan per bulan paling besar (di atas Rp. 10 Juta) sebesar 0,02% yang merupakan rasio beban PBB yang paling minimal. Rasio beban PBB yang paling besar justru ditanggung oleh golongan dengan penghasilan per bulan berkisar Rp. 1.320.000,- s/d Rp. 2.500.000,- yaitu sebesar 0,07%.

Pada tabel 4.9, dapat kita lihat bahwa dari nilai rata-rata keseluruhan harta yang dimiliki responden sebanyak 37,36% adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tempat tinggal responden. Sebanyak 13,2% dari nilai rata-rata keseluruhan harta adalah nilai taksiran atau NJOP dari tanah dan bangunan milik responden yang tidak ditinggali responden, dapat berupa rumah lain yang ditinggali sanak saudara, bangunan untuk usaha, kebun, sawah, ataupun tanah untuk investasi. Sebanyak 24,7% dari nilai rata-rata keseluruhan harta responden merupakan simpanan di bank dan sisanya sebanyak 24,8% adalah harta tak bergerak lain seperti kendaraan, emas, hewan dan sebagainya. Dari berbagai jenis harta tersebut, hanya simpanan di bank yang dapat terkorelasi dengan baik dengan likuiditas responden untuk membayar PBB. Perbedaan nilai harta antara golongan berpenghasilan terbawah dan teratas sangat mencolok ditinjau dari berbagai golongan harta. Nilai rata-rata untuk total harta tiap kelompok jenis harta untuk golongan dengan penghasilan per bulan di atas 3 kali kelipatan PTKP OP (di atas Rp. 3.960.000,-) berkisar antara Rp. 1 Milyar – Rp. 2,3 Milyar. Berbeda dengan golongan lain yang hanya memiliki harta di atas Rp. 500 Juta untuk tiap kelompok jenis harta kecuali NJOP tempat tinggal yang bernilai Rp. 1,33 Milyar untuk golongan dengan penghasilan per bulan di atas PTKP OP namun masih di bawah 3 kali kelipatan PTKP OP (Rp. 1.320.001 s/d Rp. 3.960.000,-).

**Tabel 4.9. Nilai Harta selain NJOP Tempat Tinggal**

Penghasilan	Nilai Rata-rata (Mean)			
	NJOP tempat tinggal	Tanah dan Bangunan selain tempat tinggal	Simpanan/tabungan di Bank	Harta Lainnya (Kendaraan, emas, hewan)
Di bawah PTKP OP	360.833.333	41.666.667	5.000.000	348.333.333
Di atas PTKP OP namun tidak melebihi 3 kali PTKP OP	1.332.500.000	205.000.000	357.500.000	335.125.000
Di atas 3 kali PTKP OP	2.022.500.000	1.150.000.000	2.269.166.667	1.962.500.000
Total Responden	1.248.000.000	439.500.000	825.250.000	827.300.000
Penghasilan	Persentase per Total Harta			
	NJOP tempat tinggal	Tanah dan Bangunan selain tempat tinggal	Simpanan/tabungan di Bank	Harta Lainnya (Kendaraan, emas, hewan, dll)
Di bawah PTKP OP	47,74%	5,5%	0,7%	46,1%
Di atas PTKP OP namun tidak melebihi 3 kali PTKP OP	59,75%	9,2%	16,0%	15,0%
Di atas 3 kali PTKP OP	27,32%	15,5%	30,6%	26,5%
Total Responden	37,36%	13,2%	24,7%	24,8%

Dari tabel 4.9, dapat kita lihat bahwa responden dengan tingkat penghasilan per bulan di bawah PTKP OP (di bawah Rp. 1.320.000,-) hanya memiliki nilai rata-rata simpanan di bank sebanyak hanya Rp. 5 Juta atau 0,7% total hartanya. Jumlah tersebut berbeda jauh bila dibandingkan dengan responden dengan penghasilan per bulan di atas 3 kali kelipatan PTKP OP (Di atas Rp. 3.960.000,-) yang memiliki nilai rata-rata simpanan di bank sebanyak Rp. 2,27 Milyar atau 30,6% dari hartanya.

Dari tabel 4.9, dapat kita lihat pula bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan responden semakin tinggi persentase hartanya yang merupakan harta tidak tetap (tanah dan bangunan). Responden dengan penghasilan per bulan di bawah PTKP OP hanya memiliki nilai harta tetap selain tempat tinggalnya di bawah Rp. 50 Juta (5,5% dari total hartanya) sedangkan responden dengan penghasilan per bulan di atas 3 kali kelipatan PTKP OP hanya memiliki nilai harta tetap selain tempat tinggalnya di atas Rp. 1 Milyar (15,5% dari total hartanya). Fenomena ini menguatkan teori Bahl dan Martinez-Vazquez (2007) yang menyatakan adanya korelasi akumulasi penghasilan dengan kepemilikan tanah dan bangunan di negara berkembang.

#### **4.2.4. Analisis Data Variabel Penghasilan Bersih ( $X_{1.2}$ ) dan Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih ( $X_{2.2}$ )**

Variabel Penghasilan Bersih Wajib Pajak (dilambangkan oleh  $X_{1.2}$ ) merupakan Penghasilan rutin Wajib Pajak rata-rata per bulan selama setahun (seperti gaji, laba usaha, dan penghasilan rutin lainnya termasuk pula penghasilan penghuni rumah lain yang ikut membiayai kebutuhan rumah tangga Wajib Pajak) dikurangi Biaya hidup Wajib Pajak rata-rata per bulan selama setahun (seperti biaya makan, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, termasuk pula biaya renovasi bangunan dan perawatannya). Variabel Rasio Nilai PBB yang terutang terhadap Penghasilan Bersih Wajib Pajak (dilambangkan oleh  $X_{2.2}$ ) adalah nilai rata-rata dari PBB terutang selama 3 tahun sesuai SPPT PBB untuk Tahun Pajak 2007-2009 (dilambangkan oleh  $\hat{Y}_1$ ) dibagi Penghasilan Bersih Wajib Pajak (dilambangkan oleh  $X_{1.2}$ ) selama setahun.

Pada Tabel 4.10, dapat kita lihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar dari penghasilan bulanan antar responden Wajib Pajak dimana terdapat standar koefisien deviasi sebesar 137,2%. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat pula bahwa biaya rutin per bulan tidak memiliki kesenjangan sebesar kesenjangan penghasilan per bulan (standar koefisien deviasi hanya sebesar 73,24%).

**Tabel 4.10. Penghasilan dan Biaya Rutin Wajib Pajak berdasarkan Kecamatan**

(Dalam rupiah)	Penghasilan WP (rata-rata per bulan)		
	Mean (Rata-Rata)	Median (Nilai Tengah)	Koefisien Standar Deviasi (Standar Deviasi dibagi Mean)
<b>Kecamatan</b>			
Kebayoran Baru	3.593.750	1.750.000	116,65%
Mampang Prapatan	2.844.828	1.750.000	109,86%
Pancoran & Tebet	6.583.333	3.250.000	164,03%
Pasar Minggu	11.218.750	7.000.000	103,43%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	5.017.857	1.750.000	97,77%
Cilandak & Jagakarsa	3.812.500	3.250.000	58,74%
<b>Seluruh Wilayah</b>	<b>4.768.750</b>	<b>2.125.000</b>	<b>137,32%</b>
	Biaya Rutin WP (rata-rata per bulan)		
Kebayoran Baru	3.718.099	3.291.667	53,64%
Mampang Prapatan	2.393.678	2.291.667	50,42%
Pancoran & Tebet	5.872.685	2.291.667	119,67%
Pasar Minggu	5.213.542	5.145.833	29,50%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	4.110.119	4.093.750	38,93%
Cilandak & Jagakarsa	3.354.167	3.791.667	39,62%
<b>Seluruh Wilayah</b>	<b>3.747.708</b>	<b>2.916.667</b>	<b>73,24%</b>

Dari tabel 4.10, dapat kita lihat bahwa kesenjangan penghasilan dan biaya rutin per bulan paling tinggi berada di kecamatan Pancoran-Tebet (koefisien standar deviasi 164,03% dan 119,67%) dimana terdapat seorang responden yang memiliki penghasilan per bulan di atas Rp. 20 Juta dengan biaya pendidikan per bulan di atas Rp. 10 Juta serta seorang responden dengan penghasilan per bulan yang berkisar Rp. 7 Juta dengan biaya rutin berkisar Rp. 6 Juta. Angka ini sangat mencolok bila melihat median (nilai tengah) dari penghasilan dan biaya rutin per bulan di kecamatan tersebut yang hanya berkisar Rp. 3 Juta.

Pada tabel 4.10, dapat kita lihat pula bahwa kesenjangan penghasilan per bulan juga terdapat pada kecamatan Kebayoran baru (koefisien standar deviasi 116,65%) dan kecamatan Mampang Prapatan (koefisien standar deviasi 109,86%). Bertolak belakang dengan nilai penghasilan per bulan, tidak terdapat kesenjangan biaya rutin per bulan yang besar di kedua kecamatan tersebut (koefisien standar deviasi hanya 53,64% dan 50,42%). Terdapat 20 orang (32,8%)



dari total 61 responden yang memiliki penghasilan per bulan di bawah Rp 4 Juta dimana tempat tinggalnya dihuni 6 hingga lebih dari 10 orang sehingga biaya hidup rutin per bulannya hampir sama dengan 12 responden yang memiliki penghasilan per bulan di atas Rp. 4 Juta yang biaya rutinnnya besar karena biaya pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi di atas rata-rata (di atas Rp. 2,5 Juta per bulan).

**Tabel 4.11. Perbandingan NJOP Tempat Tinggal dan Nilai Rata-Rata Penghasilan per bulan Responden tiap Kecamatan**

Kecamatan	NJOP di bawah Rp 500 Juta		NJOP Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		NJOP di atas Rp. 1 Milyar	
	Mean Penghasilan	Koefisien Standar Deviasi	Mean Penghasilan	Koefisien Standar Deviasi	Mean Penghasilan	Koefisien Standar Deviasi
Kebayoran Baru	2.680.000	76,6%	2.250.000	82,2%	3.593.750	116,6%
Mampang Prapatan	2.844.828	109,9%	5.300.000	103,0%	3.250.000	0,0%
Pancoran & Tebet	3.357.143	52,3%	6.583.333	164,0%	5.125.000	51,7%
Pasar Minggu	1.125.000	0,0%	6.593.750	92,6%	11.602.273	104,2%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	5.017.857	97,8%	4.284.091	101,3%	3.680.556	125,3%
Cilandak & Jagakarsa	3.812.500	58,7%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>Seluruh Wilayah</b>	<b>4.768.750</b>	<b>137,3%</b>	<b>4.565.860</b>	<b>144,6%</b>	<b>4.701.316</b>	<b>140,8%</b>

Dari tabel 4.11 di atas yang menggambarkan perbandingan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tempat tinggal dan nilai rata-rata (*mean*) penghasilan per bulan responden tiap kecamatan, dapat kita lihat bahwa terdapat kesenjangan penghasilan pada responden yang memiliki NJOP tempat tinggal dengan nilai yang sama. Hal ini terlihat dari koefisien standar deviasi dari penghasilan per bulan yang cukup besar di atas 100% yaitu sebesar 137,3% untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP di bawah Rp. 500 Juta, sebesar 144,6% untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP yang berkisar antara Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar dan 140,8% dan sebesar 140,8% untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP di atas Rp. 1 Milyar. Demikian juga

bila dilihat dari rata-rata penghasilan, dari responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP yang berbeda diperoleh rata-rata penghasilan per bulan yang hampir sama dan kurang dari Rp. 5 Juta yaitu sebesar Rp. 4.768.750,- untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP di bawah Rp. 500 Juta, sebesar Rp. 4.565.860,- untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP yang berkisar antara Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar dan sebesar Rp. 4.701.316,- untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP di atas Rp. 1 Milyar.

Kesenjangan penghasilan paling tinggi terjadi pada kelompok responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP yang berkisar antara Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar di kecamatan Pancoran-Tebet yang ditandai dengan koefisien standar deviasi sebesar 164% dengan nilai rata-rata penghasilan per bulan sebesar Rp. 6.583.333,-. Kesenjangan penghasilan juga terdapat pada kelompok responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP di atas Rp. 1 Milyar di kecamatan Kebayoran Baru serta kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama yang ditandai dengan koefisien standar deviasi sebesar 116,6% dan 125,3%. Bahkan di kedua kelompok kecamatan tersebut, nilai rata-rata penghasilan per bulan hanya Rp. 3.593.750,- dan Rp. 3.680.556,- yang berarti rata-rata responden mengorbankan sekitar dua pertiga (66,7%) dari pendapatan per bulannya untuk membayar tagihan PBB di atas Rp. 2 Juta (sesuai UU PBB dan PP No. 25 Tahun 2002 dihitung dari tarif efektif 0,2% untuk NJOP di atas Rp. 1 Milyar).

Fenomena kesenjangan penghasilan untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP yang sama ini telah membantah Bahl dan Martinez-Vazquez (2007) yang menyatakan adanya korelasi akumulasi penghasilan dengan kepemilikan tanah dan bangunan di negara berkembang. Teori ini tepat digunakan bila kenaikan nilai tanah dan bangunan dilihat dari perbaikan nilai bangunan yang merupakan konsumsi dari penghasilan Wajib Pajak ataupun bila tanah dan bangunan selain digunakan sebagai tempat tinggal juga disewakan atau digunakan untuk memperoleh penghasilan Wajib Pajak. Namun yang terjadi pada penelitian pada responden Wajib Pajak Jakarta Selatan ini, kenaikan tajam NJOP atas tempat tinggal lebih banyak disebabkan oleh perubahan lingkungan terutama karena laju pembangunan yang pesat di kota besar seperti Jakarta.

**Tabel. 4.12. Perhitungan Penghasilan Bersih (X<sub>1.2</sub>) dan Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>) ditinjau dari Penghasilan rata-rata per bulan**

	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Penghasilan WP (rata-rata per bulan)</b>	<b>Mean Nilai PBB</b>	<b>Mean Nilai Penghasilan per tahun</b>	<b>Mean Nilai Biaya Rutin per tahun</b>	<b>Mean Nilai Biaya Renovasi dan Perawatan per tahun</b>
<b>Di bawah PTKP WP OP (UU Pph psl 17)</b>	260.655	11.484.375	40.977.679	831.101
<b>Di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya</b>	1.868.333	29.325.000	36.437.500	1.579.167
<b>Di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP</b>	3.857.833	168.000.000	57.393.750	9.666.667
<b>Total Seluruh Responden</b>	984.100	57.225.000	44.972.500	3.121.667
	(5) = (2)-(3)-(4)	(6) = (1)/(2)	(7) = (1)/(5)	
<b>Penghasilan WP (rata-rata per bulan)</b>	<b>Penghasilan Bersih</b>	<b>%PBB terhadap Penghasilan</b>	<b>%PBB terhadap Penghasilan Bersih</b>	
<b>Di bawah PTKP WP OP (UU Pph psl 17)</b>	(30.324.405)	2,27%	11733,93%	
<b>Di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya</b>	(8.691.667)	6,37%	565,21%	
<b>Di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP</b>	100.939.583	2,30%	3,82%	
<b>Total Seluruh Responden</b>	9.130.833	1,72%	10,78%	

Pada tabel 4.12, dapat kita lihat bahwa rata-rata (mean) nilai PBB ( $\hat{Y}_1$ ) untuk seluruh responden (kolom 1) adalah Rp. 984.100,-; rata-rata nilai penghasilan setahun untuk seluruh responden (kolom 2) adalah Rp. 57.225.000,-;

rata-rata nilai biaya rutin setahun untuk seluruh responden (kolom 3) adalah Rp.44.972.500,- dan rata-rata nilai biaya renovasi dan perawatan per tahun untuk seluruh responden (kolom 4) adalah Rp. 3.121.667,-

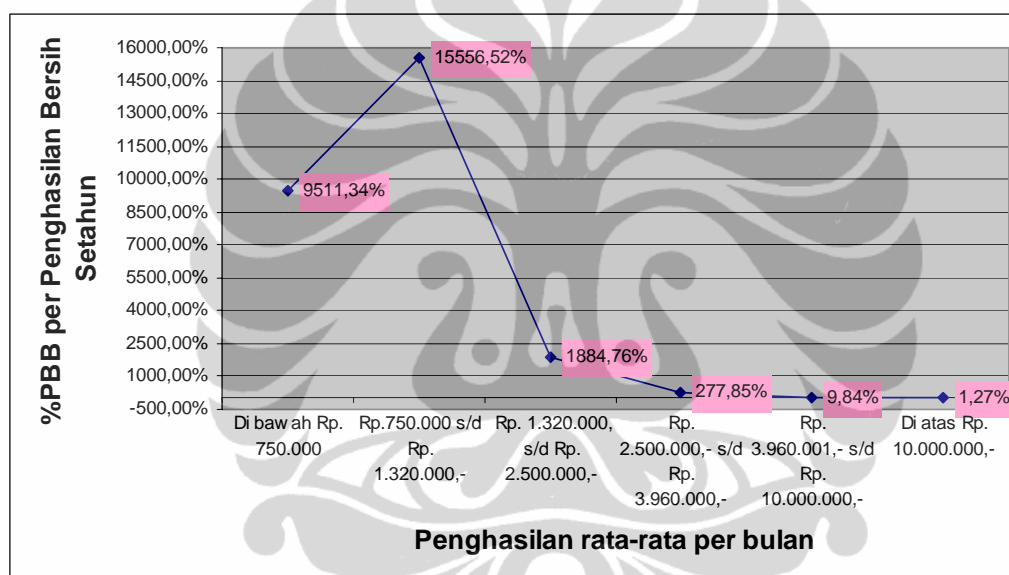
Pada tabel 4.12, dapat kita lihat juga bahwa dari perhitungan rata-rata nilai penghasilan setahun dikurangi rata-rata nilai biaya rutin setahun dan dikurangi lagi dengan rata-rata nilai biaya renovasi dan perawatan per tahun untuk seluruh responden (kolom 5) diperoleh rata-rata nilai Penghasilan Bersih ( $X_{1.2}$ ) sebesar Rp. 9.130.833,-. Dari perhitungan rata-rata nilai PBB dibagi dengan nilai Penghasilan Bersih (kolom 7) dihasilkan Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih ( $X_{2.2}$ ) sebesar 10,78% yang jumlahnya cukup jauh dengan rasio PBB terhadap penghasilan tanpa dikurangi biaya-biaya (kolom 6) yang nilainya 1,72%. Hal ini menunjukkan pengaruh nilai biaya rutin serta biaya perawatan dan renovasi terhadap Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih ( $X_{2.2}$ ) sangat signifikan.

Berdasarkan tabel 4.12, dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan rata-rata per bulan dari para responden, semakin tinggi nilai PBB terhutang (kolom 1) dan semakin besar pula nilai penghasilan setahun (kolom 2) dan penghasilan bersihnya (kolom 5). Golongan dengan penghasilan per bulan di bawah PTKP OP (di bawah Rp. 1.320.000,-) memiliki nilai Penghasilan Bersih negatif yaitu sebesar -Rp.30.324.405 yang berarti biaya rutin dan biaya perawatan yang ditanggungnya jauh melebihi penghasilannya. Golongan dengan penghasilan per bulan di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya (antara Rp. 1.320.001,- s/d Rp. 3.960.000,-) juga memiliki nilai Penghasilan Bersih negatif namun jumlahnya lebih sedikit yaitu sebesar -Rp. 8.691.667. Golongan dengan penghasilan per bulan di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP (di atas Rp. 3.960.000,-) memiliki nilai Penghasilan Bersih positif yang cukup besar senilai Rp. 100.939.583 (1105,5% dari rata-rata Penghasilan Bersih seluruh responden).

Pada tabel 4.12, bila dilihat dari Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (kolom 7), nilai rasio turun dengan semakin tingginya tingkat penghasilan. Nilai rasio di atas 100% menunjukkan beban PBB jauh lebih besar daripada penghasilan bersihnya dan bila penghasilan bersih bernilai negatif, rasio itu akan bertambah sesuai dengan defisit penghasilan. Golongan dengan penghasilan per bulan di bawah PTKP OP (di bawah Rp. 1.320.000,-) memiliki Rasio PBB terhadap

Penghasilan Bersih yang sangat tinggi yaitu 11.733,93%. Golongan dengan penghasilan per bulan di atas PTKP WP OP namun tidak melebihi 3 kali kelipatannya (antara Rp. 1.320.001,- s/d Rp. 3.960.000,-) memiliki nilai Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih yang masih di atas 100% yaitu sebesar 565,21%. Golongan penghasilan teratas yaitu golongan dengan penghasilan per bulan di atas 3 kali kelipatan PTKP WP OP (di atas Rp. 3.960.000,-) justru memiliki nilai Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih yang paling kecil yaitu sebesar 3,82%.

**Gambar. 4.3. Grafik Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>) ditinjau dari Penghasilan rata-rata per bulan**



Tidak berbeda jauh dengan pengamatan pada tabel 4.12, pada grafik dalam gambar 4.3, terlihat bahwa Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>) mengalami kisaran perbedaan nilai yang signifikan (1,27% hingga 15.556,52%) dan pergerakan grafiknya cenderung menurun ditinjau dari tingkat penghasilan rata-rata per bulan, dari 9.511,34% bergerak naik 15.556,52% lalu turun drastis 1884,76% lalu terus menurun dari 277,85% ke 9,84% dan turun lagi menjadi 1,27%. Bila hanya melihat pada pergerakan grafik ini, PBB cenderung regresif terhadap variabel Penghasilan Bersih. Hal ini terlihat dari responden dengan tingkat penghasilan rata-rata per bulan yang paling tinggi (golongan dengan penghasilan per bulan di atas Rp. 10 Juta) justru menanggung rasio beban PBB yang paling kecil yaitu sebesar 1,27% dari penghasilan bersihnya. Selain itu, rasio

beban PBB paling besar justru ditanggung oleh golongan berpenghasilan per bulan yang berkisar antara Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.320.000,- yaitu 15.556,62% dari penghasilan bersihnya. Golongan berpenghasilan paling rendah (di bawah Rp. 750.000,-) juga menanggung beban PBB yang sangat besar yaitu 9.511,34% dari penghasilan bersihnya.

#### 4.2.5. Analisis Data Variabel Ketidakmampuan Membayar ( $\hat{Y}_2$ )

Variabel Ketidakmampuan Membayar Wajib Pajak (dilambangkan dengan  $\hat{Y}_2$ ) adalah indikasi beban PBB terhadap Wajib Pajak terlalu besar sehingga tidak mampu membayar. Indikator yang dipakai yaitu bila Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun keluhan Wajib Pajak seputar tagihan PBB.

**Tabel 4.13. Indikator Ketidakmampuan Membayar Wajib Pajak**

Masalah Ketidakmampuan Membayar	Jumlah	% dari total responden	% dari total responden yang bermasalah
Ada masalah dengan ketidakmampuan membayar	60	60,0%	
Tidak ada masalah dengan ketidakmampuan membayar	40	40,0%	
Total Responden	100		
<b><u>Keluhan Wajib Pajak (Boleh pilih lebih dari 1):</u></b>			
-Kesulitan arus kas untuk membayar	28	28,0%	46,7%
-Kenaikan tagihan PBB melonjak tinggi	30	30,0%	50,0%
-PBB terlalu besar	32	32,0%	53,3%
-NJOP tidak akurat, bangunan tua tapi NJOP tinggi	2	2,0%	3,3%

Dari tabel 4.13, dapat kita lihat bahwa hanya 40 orang (40%) Wajib Pajak yang tidak memiliki masalah ketidakmampuan membayar yang berarti 60 orang (60%) Wajib Pajak memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar. Dari 60 orang Wajib Pajak yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar, sebesar 28 orang (46,7%) Wajib Pajak mengeluh memiliki kesulitan arus kas untuk membayar PBB terutama disebabkan oleh penghasilan yang

menurun dan biaya hidup yang terus naik, 30 orang (50%) Wajib Pajak mengeluh atas kenaikan PBB yang melonjak tinggi dari tahun sebelumnya, 32 orang (53,3%) Wajib Pajak merasa beban PBB terlalu besar untuk kemampuan ekonomis mereka dan sebanyak 2 orang (3,3%) Wajib Pajak merasa perhitungan NJOP tidak akurat karena nilainya terlalu tinggi untuk bangunan rumah mereka yang sudah tua.

**Tabel 4.14 Reaksi Wajib Pajak atas Masalah Ketidakmampuan Membayar**

<u>Reaksi WP atas Masalah Ketidakmampuan Membayar</u>	Tetap Membayar atau tidak bayar setahun		Tidak membayar PBB lebih dari setahun		Total	%
	Sub total	% dari total responden yang bermasalah	Sub total	% dari total responden yang bermasalah		
Mengajukan surat permohonan pengurangan PBB ke KPP	15	25,0%	-	0,0%	15	25%
Ingin Mengajukan Permohonan pengurangan PBB tapi tidak tahu caranya	14	23,3%	4	6,7%	18	30%
Ingin Mengajukan Permohonan pengurangan PBB tapi belum dilaksanakan	3	5,0%	2	3,3%	5	8,3%
Diam saja	13	21,7%	9	15,0%	22	36,7%
<b>Total</b>	45	75,0%	15	25,0%	60	100%

Dari tabel 4.14, dapat kita lihat bahwa masalah ketidakmampuan membayar ini ditanggapi berbeda oleh Wajib Pajak. Dari 60 orang Wajib Pajak yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayarnya, sebanyak 45 orang (75%) tetap membayar dan sebanyak 9 orang (15%) Wajib Pajak memilih untuk tidak membayar dan sudah menunggak tagihan PBB lebih dari setahun. Dari 60 orang Wajib Pajak yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayarnya, sebanyak 15 orang (25%) Wajib Pajak sudah mengajukan surat permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) namun 18

orang (30%) Wajib Pajak menyatakan ingin mengajukan permohonan pengurangan PBB tapi tidak tahu caranya, 5 orang (3,3%) Wajib Pajak belum melaksanakannya dan sebanyak 22 orang (36,7%) lebih memilih untuk tidak menghiraukannya. Sebanyak 4 orang dari 18 orang Wajib Pajak yang menyatakan ingin mengajukan permohonan pengurangan PBB tapi tidak tahu caranya memilih untuk tidak membayar PBB lebih setahun. Demikian pula dengan 2 orang dari 5 orang Wajib Pajak yang menyatakan ingin mengajukan permohonan pengurangan PBB tapi belum dilaksanakan.

Bila saja, sosialisasi lebih intensif dan terdapat kemudahan untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB dengan cepat, angka ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar dapat ditekan. Bila mekanisme permohonan pengurangan PBB dijalankan dengan baik, sesuai PMK No. 110/PMK.03/2009 Pasal 2 dimana pengurangan dapat diberikan maksimal 75% bagi Wajib Pajak yang mengalami masalah likuiditas maka aparat pajak dapat mengumpulkan minimal 25% dari tagihan PBB yang tertunggak.

**Tabel 4.15. Jumlah Responden yang Bermasalah dan Tidak Bermasalah dengan Ketidakmampuan Membayar per Kecamatan**

Kecamatan	Bermasalah dengan Ketidakmampuan Membayar		Tidak Bermasalah dengan Ketidakmampuan Membayar	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kebayoran Baru	27	84,4%	5	15,6%
Mampang Prapatan	11	37,9%	18	62,1%
Pancoran & Tebet	2	22,2%	7	77,8%
Pasar Minggu	10	83,3%	2	16,7%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	9	64,3%	5	35,7%
Cilandak & Jagakarsa	1	25,0%	3	75,0%
<b>Seluruh Wilayah</b>	<b>60</b>	<b>60,0%</b>	<b>40</b>	<b>40,0%</b>

Pada tabel 4.15, dapat kita lihat bahwa kecamatan Kebayoran Baru, Pasar Minggu serta kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama memiliki angka persentase jumlah responden yang bermasalah dengan ketidakmampuan membayar yang cukup tinggi yaitu sebesar 84,4%, 83,3% dan 64,3%. Hal ini dapat diwajari karena Kecamatan Pasar Minggu dan Kebayoran Baru memiliki



rata-rata NJOP tertinggi (Rp. 2,79 Milyar dan Rp. 1,84 Milyar) sedangkan pada kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama, terjadi kenaikan PBB akibat kenaikan NJOP dari tahun pajak 2007-2009 pada tempat tinggal dari 6 responden (42,8% dari responden kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama).

**Tabel 4.16. Jumlah Responden Yang Tidak Tahu Cara Mengajukan Permohonan pengurangan PBB serta Yang Sudah Mengajukannya per Kecamatan**

Kecamatan	Ingin Mengajukan Permohonan pengurangan PBB Tapi Tidak tahu caranya		Sudah Mengajukan Permohonan pengurangan PBB	
	Jumlah	% dari responden yg bermasalah dgn ketidakmampuan membayar	Jumlah	% dari responden yg bermasalah dgn ketidakmampuan membayar
Kebayoran Baru	11	40,7%	8	29,6%
Mampang Prapatan	1	9,1%	1	9,1%
Pancoran & Tebet	1	50,0%	1	50,0%
Pasar Minggu	2	20,0%	5	50,0%
Pesanggrahan & Kebayoran Lama	2	22,2%	-	0,0%
Cilandak & Jagakarsa	1	100,0%	-	0,0%
<b>Seluruh Wilayah</b>	<b>18</b>	<b>18,0%</b>	<b>15</b>	<b>15,0%</b>

Pada tabel 4.16, dapat kita lihat bahwa kecamatan Kebayoran Baru memiliki persentase jumlah responden yang ingin mengajukan permohonan pengurangan PBB tapi tidak tahu caranya paling besar yaitu sebesar 34,4% dari total responden yang bermasalah dengan ketidakmampuan membayar di kecamatan tersebut. Dari kecamatan-kecamatan dengan angka persentase jumlah responden yang bermasalah dengan ketidakmampuan membayar yang cukup tinggi (di atas 60%), hanya kecamatan Pasar Minggu yang juga memiliki persentase yang tinggi dari jumlah responden yang sudah mengajukan permohonan pengurangan PBB yaitu sebesar 50%. Pada kecamatan Kebayoran

Baru (dengan persentase responden yang bermasalah dengan ketidakmampuan membayar sebesar 84,4%), persentase permohonan pengurangan PBB hanya sebesar 29,6% bahkan pada kecamatan Pesanggrahan-Kebayoran Lama belum ada responden yang mengajukan permohonan pengurangan PBB. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi mengenai permohonan pengurangan di kedua kelompok kecamatan tersebut.

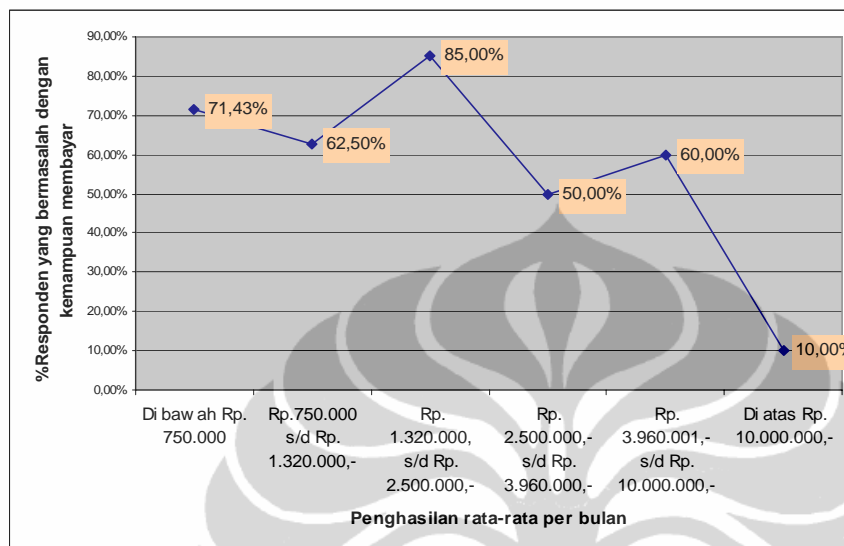
**Tabel 4.17. Latar Belakang Responden Yang Tidak Tahu Cara Mengajukan Permohonan Pengurangan PBB serta Yang Sudah Mengajukannya**

Latar Belakang	Ingin Mengajukan Permohonan pengurangan PBB Tapi Tidak tahu caranya		Sudah Mengajukan Permohonan pengurangan PBB	
	Jumlah	%	Jumlah	%
SD/SMP	4	22,2%	3	20,0%
SMA	10	55,6%	7	46,7%
Diploma	3	16,7%	2	13,3%
S1	1	5,6%	3	20,0%
S2	-	0,0%	-	0,0%
S3	-	0,0%	-	0,0%
<b>Total</b>	18	18,0%	15	15,0%

Dari tabel 4.17, dapat kita lihat bahwa latar belakang pendidikan responden mempengaruhi jumlah ketidaktahuan responden dalam mengajukan permohonan pengurangan PBB. Sebesar 14 orang (77,8%) responden yang ingin mengajukan permohonan keringanan tapi tidak tahu caranya adalah responden yang bukan lulusan perguruan tinggi dimana sebesar 4 orang (22,2%) berlatarbelakang pendidikan SD/SMP dan 10 orang (55,6%) berlatar belakang pendidikan SMA. Walaupun demikian, sejumlah responden dari latar belakang pendidikan yang sama mengetahui cara permohonan pengurangan PBB dan sudah mengajukan permohonan tersebut. Dari jumlah responden yang sudah mengajukan permohonan keringanan terdapat 3 orang (20%) berlatarbelakang pendidikan SD/SMP dan 7 orang (46,7%) berlatarbelakang pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi latar belakang pendidikan. Wajib Pajak dapat menggali informasi yang lebih dalam

mengenai peraturan perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan aparat pajak, media massa ataupun pendidikan non formal.

**Gambar. 4.4. Grafik Persentase Responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar ditinjau dari Penghasilan rata-rata per bulan**

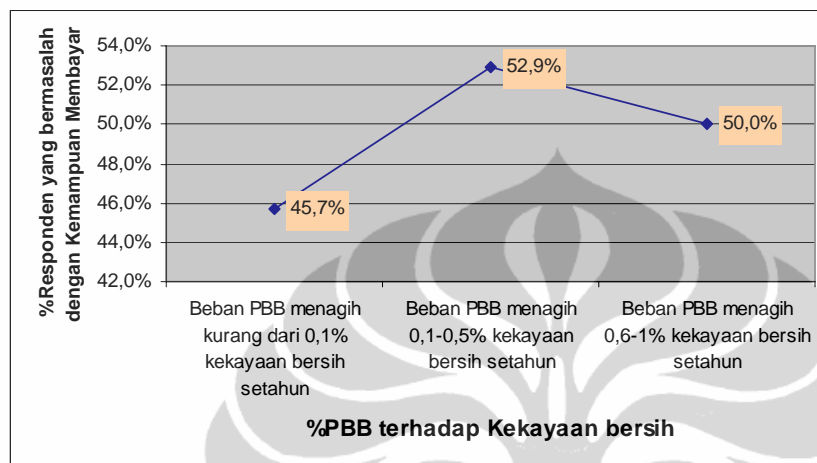


Pada gambar 4.4, grafik persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar bergerak cenderung turun bila ditinjau dari tingkat penghasilan rata-rata per bulan. Dari 71,43% turun 62,5% lalu naik lagi menjadi 85% turun menjadi 50% naik lagi menjadi 60% dan akhirnya turun drastis menjadi 10%. Untuk golongan berpenghasilan teratas (golongan dengan penghasilan per bulan di atas Rp. 10 Juta), persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar adalah yang paling sedikit (10%) dimana hanya ada 1 orang dari 10 orang yang bermasalah dngan ketidakmampuan membayar. Untuk golongan yang berpenghasilan per bulan di bawah Rp. 2,5 Juta, persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar sangat tinggi yaitu sebesar 71,43% untuk golongan dengan penghasilan per bulan di bawah Rp. 750.000,- , sebesar 62,5% untuk golongan dengan penghasilan per bulan yang berkisar antara Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.320.000,- dan sebesar 85% untuk golongan dengan penghasilan per bulan yang berkisar antara Rp. 1.320.000,- s/d Rp. 2.500.000,-.

Fenomena ini menggambarkan korelasi yang negatif antara angka ketidakmampuan membayar Wajib Pajak dengan tingkat penghasilannya. Secara

umum, semakin besar tingkat penghasilan, semakin mengecil persentase angka ketidakmampuan membayar Wajib Pajak.

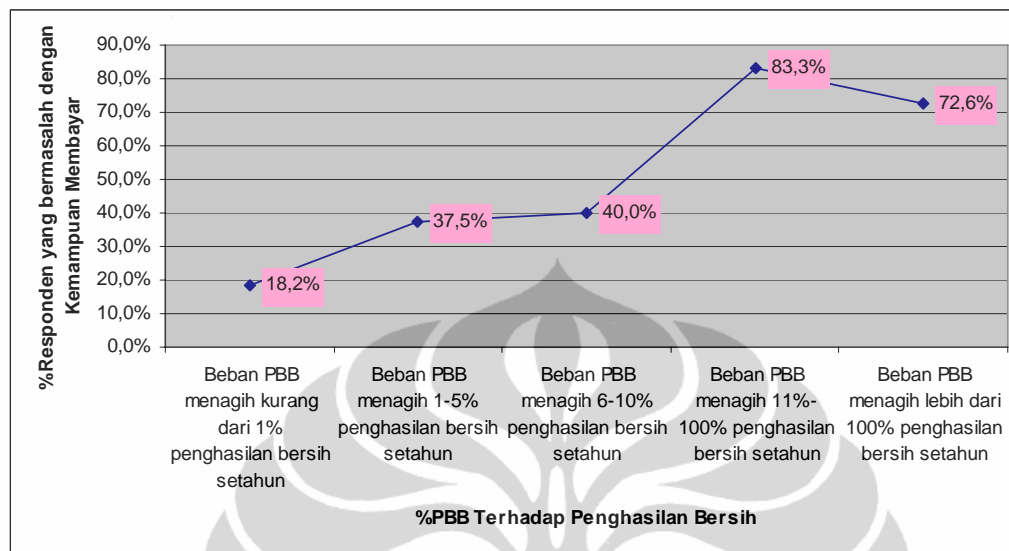
**Gambar. 4.5. Grafik Persentase Responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar ditinjau dari Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>)**



Pada gambar 4.5, terlihat bahwa grafik persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar cenderung stagnan bila ditinjau dari variabel rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) dan nilainya pun tidak bergerak terlalu jauh (45,7% s/d 52,9%). Hal ini mungkin disebabkan karena rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih sendiri juga hanya berkisar 0,1% s/d 1% namun hal ini juga bisa menunjukkan bahwa rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) tidak terlalu mempengaruhi persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar.

Pada gambar 4.6, terlihat bahwa grafik persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar cenderung naik bila ditinjau dari variabel rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>). Dari 18,2% naik menjadi 37,5% naik lagi menjadi 40% lalu meningkat tajam menjadi 83,3% dan akhirnya turun sedikit menjadi 72,6%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai minimum (18,2%) dan maksimal (83,3%) dari persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar. Hal ini disebabkan karena rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih sendiri juga memiliki kisaran nilai yang jauh (kurang dari 1% hingga lebih dari 100%).

**Gambar. 4.6. Grafik Persentase Responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar ditinjau dari Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>)**



Bila melihat dari grafik tersebut, terlihat kenaikan rasio beban PBB terhadap Penghasilan Bersih berakibat pada kenaikan persentase responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar dan sebaliknya. Hal ini terlihat dari persentase responden yang bermasalah dengan ketidakmampuan membayar paling minimal (18,2%) berada pada golongan yang rasio PBB terhadap penghasilan bersihnya kurang 1% sedangkan persentase responden yang bermasalah dengan ketidakmampuan membayar paling maksimal (83,3% dan 72,6%) berada pada golongan yang rasio PBB terhadap penghasilan bersihnya 11%-100% dan yang rasio PBB terhadap penghasilan bersihnya lebih dari 100%.

#### 4.3. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus memenuhi persyaratan yaitu validitas dan reliabilitas. Kuisioner telah disebarkan pada 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan untuk mendapatkan 7 pertanyaan yang jawabannya diperlukan dalam menghitung nilai variabel penelitian yaitu:

- 1) Jumlah PBB terutang;
- 2) Penghasilan gabungan penghuni tempat tinggal responden;

- 3) Biaya rutin untuk kehidupan penghuni tempat tinggal seperti biaya makan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
- 4) Biaya pemeliharaan seperti renovasi dan perawatan bangunan;
- 5) Nilai harta Wajib Pajak;
- 6) Nilai utang Wajib Pajak; dan
- 7) Indikasi responden atau penghuni tempat tinggal lainnya bermasalah dalam hal kemampuan membayar PBB yang terutang atas tempat tinggalnya.

**Tabel 4.18. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas oleh SPSS**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0
Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	
.007	.710	7	

Tabel 4.18 adalah tabel hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang diproses oleh perangkat statistika SPSS. Dalam tabel tersebut, pada kolom "Case Processing Summary" dinyatakan dijelaskan bahwa *case valid* N=100, 100% dan *case excluded* N=0, 0%. Hasil ini menggambarkan bahwa ketujuh pertanyaan yang dijawab oleh 100 responden dapat diandalkan jawabannya (*valid*) 100% sehingga tidak ada pertanyaan yang perlu dibuang karena tidak valid. Pada kolom "Reliability Statistics", terdapat *cronbach's alpha* 0,007 (di bawah tingkat signifikansi 0,05) dan N=7 yang berarti ketujuh variabel pertanyaan dapat dipercaya jawabannya (*reliable*) karena probailitas kesalahan dari jawabannya masih di bawah 5% (karena tingkat kepercayaan yang dipakai 95%). Dengan hasil

perhitungan ini, ketujuh pertanyaan telah dapat dinyatakan lulus uji validitas dan reliabilitas.

#### 4.4. Analisis Regresi dan Analisis Kesesuaian Persamaan Regresi

##### 4.4.1. Analisis Regresi dan Analisis Kesesuaian Persamaan Regresi antara PBB ( $\hat{Y}_1$ ) dengan Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ) dan Penghasilan Bersih ( $X_{1.2}$ )

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.19, dari hasil perhitungan SPSS dihasilkan koefisien beta baku (*standardized coefficients beta*) atas analisis regresi persamaan (3):  $\hat{Y}_1 = a_1 + b_{1.1} X_{1.1} + b_{1.2} X_{1.2}$  yaitu sebesar 0,667 untuk  $X_{1.1}$  dan sebesar -0,021 untuk  $X_{1.2}$ . Terdapat pula *unstandardized coefficients* sebesar 420.076,626. Dari hasil tersebut, dapat dibuat korelasi regresi linear berganda antara PBB ( $\hat{Y}_1$ ) dengan Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ) dan Penghasilan Bersih ( $X_{1.2}$ ) dengan rumus regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y}_1 = 420.076,626 + 0,667 X_{1.1} - 0,021 X_{1.2} \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

$\hat{Y}_1$  = Nilai rata-rata PBB terutang di Jakarta Selatan

$X_{1.1}$  = Kekayaan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan

$X_{1.2}$  = Penghasilan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan

$a_1$  = *intercept* persamaan (3) = 420.076,626

$b_{1.1}$  = Koefisien regresi antara  $X_{1.1}$  dengan  $\hat{Y}_1 = 0,667$

$b_{1.2}$  = Koefisien regresi antara  $X_{1.2}$  dengan  $\hat{Y}_1 = -0,021$

**Tabel 4.19. Hasil Perhitungan SPSS atas Korelasi Regresi ( $b_{1.1}$  dan  $b_{1.2}$ )**

**untuk model regresi  $\hat{Y}_1 = a_1 + b_{1.1} X_{1.1} + b_{1.2} X_{1.2}$**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	420076.626	135074.223		3.110	.002
	X <sub>1.1</sub>	.000	.000	.667	7.880	.000
	X <sub>1.2</sub>	.000	.002	-.021	-.246	.807

a. Dependent Variable:  $\hat{Y}_1$

Berdasarkan persamaan (6), nilai koefisien regresi ( $b_{1.1}$ ) antara  $X_{1.1}$  dengan  $\hat{Y}_1$  adalah 0,667 yang berarti Nilai PBB terutang rata-rata ( $\hat{Y}_1$ ) naik 66,7% setiap kenaikan 1 kali nilai Kekayaan Bersih Wajib Pajak ( $X_{1.1}$ ). Korelasi positif ini menunjukkan bahwa semakin banyak kekayaan bersih Wajib Pajak, semakin besar PBB yang harus dibayarnya yang juga berarti PBB progresif bila ditinjau dari Kekayaan Bersih.

Berdasarkan persamaan (6), nilai koefisien regresi ( $b_{1.2}$ ) antara  $X_{1.2}$  dengan  $\hat{Y}_1$  adalah -0,021 yang berarti Nilai PBB terutang rata-rata ( $\hat{Y}_1$ ) turun 2,1% setiap kenaikan 1 kali nilai Penghasilan Bersih Wajib Pajak ( $X_{1.2}$ ). Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa semakin banyak penghasilan bersih Wajib Pajak, semakin sedikit PBB yang harus dibayarnya. Hal ini menunjukkan PBB regresif bila ditinjau dari Penghasilan Bersih.

Dari tabel 4.19 juga terdapat hasil perhitungan uji t terhadap koefisien regresi. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat pada kolom "Sig" bahwa koefisien beta  $X_{1.1}$  ( $b_{1.1}$ ) memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,000 di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti koefisien regresi  $b_{1.1}$  signifikan dan nilai Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ) secara signifikan mempengaruhi nilai PBB ( $\hat{Y}_1$ ). Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa koefisien beta untuk  $X_{1.2}$  ( $b_{1.2}$ ) memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,807 di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti koefisien regresi  $b_{1.2}$  tidak signifikan dan nilai Penghasilan Bersih ( $X_{1.2}$ ) tidak terlalu signifikan mempengaruhi nilai PBB ( $\hat{Y}_1$ ).

Sangatlah wajar bila nilai Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ) secara signifikan mempengaruhi nilai PBB ( $\hat{Y}_1$ ) karena dasar pengenaan PBB adalah Nilai bangunan dan tanah yang merupakan komponen nilai Kekayaan Bersih ( $X_{1.1}$ ). Nilai Penghasilan Bersih ( $X_{1.2}$ ) tidak terlalu signifikan mempengaruhi nilai PBB ( $\hat{Y}_1$ ) karena seperti yang telah diterangkan sebelumnya pada tabel 4.11 bahwa terdapat kesenjangan penghasilan untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang sama. Kenaikan NJOP tidak hanya dilihat dari perbaikan nilai bangunan atau nilai sewa dari bangunan yang dapat dihubungkan langsung dengan penghasilan Wajib Pajak namun dapat juga terjadi karena faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan penghasilan Wajib Pajak seperti perubahan lingkungan terutama di kota besar yang laju pembangunannya pesat.



**Tabel 4.20. Hasil Perhitungan SPSS atas koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji Anova ( $F$ -test) untuk model regresi  $\hat{Y}_1 = 420.076,626 + 0,667 X_{1.1} - 0,021 X_{1.2}$**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	.658 <sup>a</sup>	.434	.422	1.17939E6		
ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.033E14	2	5.164E13	37.124	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.349E14	97	1.391E12		
	Total	2.382E14	99			
a. Predictors: (Constant), $X_{1.1}$ , $X_{1.2}$						
b. Dependent Variable: $\hat{Y}_1$						

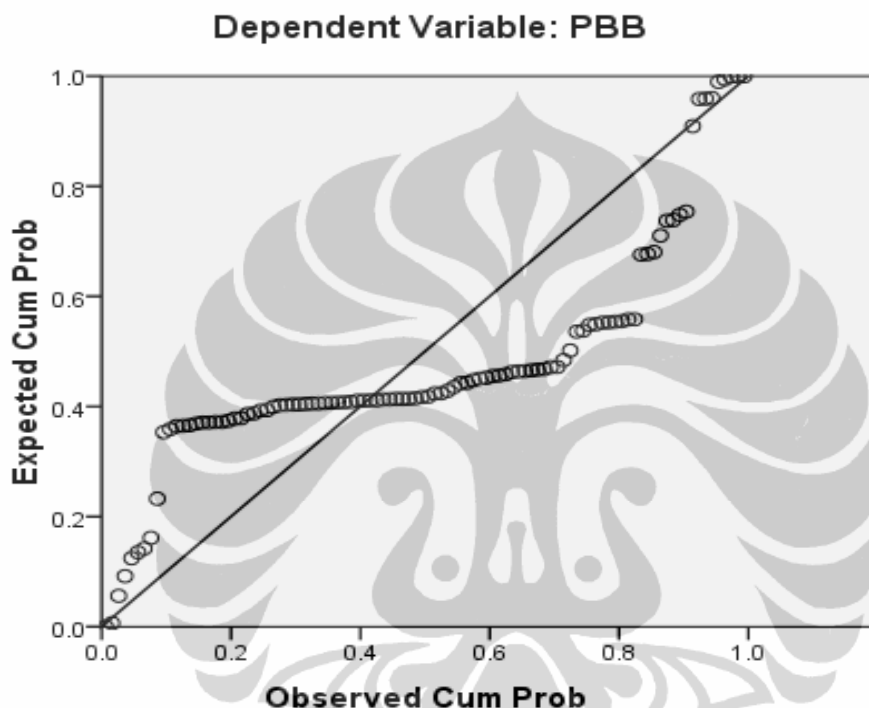
Dari perhitungan SPSS atas koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari persamaan (6) seperti yang terlihat pada tabel 4.20, kolom "*R Square*" menyatakan nilai koefisien determinasi 0,434 yang berarti persamaan regresi dapat diandalkan (valid) sebesar 43,4% dalam mencerminkan data. Pada kolom "*R*" terdapat koefisien korelasi (*R*) yang merupakan akar dari koefisien determinasi ( $R^2$ ).sebesar 0,658 yang berarti hubungan antara variabel dependen dan independen cukup erat (nilai *R* lebih mendekati 1 daripada 0). Karena nilai koefisien korelasi (*R*) bernilai positif, maka terdapat korelasi positif antara variabel dependen dan independen. Hal ini disebabkan nilai koefisien regresi ( $b_{1.2}$ ) antara  $X_{1.2}$  dengan  $\hat{Y}_1$  yang negatif tidak terlalu signifikan mempengaruhi persamaan regresi bila dibandingkan nilai koefisien regresi ( $b_{1.1}$ ) antara  $X_{1.1}$  dengan  $\hat{Y}_1$  yang positif.

Dalam uji Anova atas kesesuaian persamaan (6) pada tabel 4.20 menyatakan nilai *F* hitung 37,142 dengan tingkat signifikansi 0,00 (di bawah 0,05) yang berarti model regresi lulus uji Anova dan bisa dipakai untuk memprediksi nilai variabel dependen.

Dari gambar 4.7, dapat dilihat persamaan (6) membentuk titik-titik plot yang mendekati garis regresi. Titik-titik plot menyatu dengan garis regresi di ujung bawah dan atas garis regresi namun di tengah garis regresi, titik-titik

menyebar. Hal ini menunjukkan kesesuaian garis regresi untuk golongan dengan kemampuan ekonomis paling bawah dan paling atas dimana golongan dengan kemampuan ekonomis paling bawah membayar PBB paling sedikit dan golongan dengan kemampuan ekonomis paling atas membayar PBB paling banyak.

**Gambar 4.7. Gambar Normal P-Plot dari Garis Regresi dari persamaan  $Y = \hat{Y}_1 = 420.076,626 + 0,667 X_{1.1} - 0,021 X_{1.2}$**



#### 4.4.2. Analisis Regresi dan Analisis Kesesuaian Persamaan Regresi antara Ketidakmampuan Membayar ( $\hat{Y}_2$ ) dengan Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih ( $X_{2.1}$ ) dan Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih ( $X_{2.2}$ )

Merujuk pada tabel 4.21, dari hasil perhitungan SPSS dihasilkan koefisien beta baku (*standardized coefficients beta*) atas analisis regresi persamaan (4):  $\hat{Y}_2 = a_2 + b_{2.1} X_{2.1} + b_{2.2} X_{2.2}$  yaitu sebesar 0,028 untuk  $X_{2.1}$  dan -0,043 untuk  $X_{2.2}$ . Terdapat pula *unstandardized coefficients* sebesar 6,393. Dari hasil tersebut, dapat dibuat korelasi regresi linear berganda antara Ketidakmampuan Membayar ( $\hat{Y}_2$ ) dengan Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih ( $X_{2.1}$ ) dan Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih ( $X_{2.2}$ ) dengan rumus regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y}_2 = 6,393 + 0,028 X_{2.1} - 0,043 X_{2.2} \dots \dots \dots (7)$$

Dimana:

$\hat{Y}_2$  = Ketidakmampuan membayar Wajib Pajak di Jakarta Selatan; nilai  $\hat{Y}_2 = 1$  bila tidak ada masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak dan  $\hat{Y}_2 = 10$  bila terdapat masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak

$X_{2.1}$  = Rasio Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan

$X_{2.2}$  = Rasio Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang terhadap Penghasilan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan

$b_{2.1}$  = Koefisien regresi antara  $X_{2.1}$  dengan  $\hat{Y}_2 = 0,028$

$b_{2.2}$  = Koefisien regresi antara  $X_{2.2}$  dengan  $\hat{Y}_2 = -0,043$

$a_2$  = *intercept* persamaan (4) = 6,393

**Tabel 4.21. Hasil Perhitungan SPSS atas Korelasi Regresi ( $b_{2.1}$  dan  $b_{2.2}$ ) untuk model regresi  $\hat{Y}_2 = a_2 + b_{2.1} X_{2.1} + b_{2.2} X_{2.2}$**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.393	.641		9.978	.000
	$X_{2.1}$	1.154	4.112	.028	.281	.780
	$X_{2.2}$	-1.680E-5	.000	-.043	-.421	.675

a. Dependent Variable:  $\hat{Y}_2$

Dari tabel 4.21 juga terdapat hasil perhitungan uji t terhadap koefisien regresi. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat pada kolom "Sig" bahwa koefisien beta ( $b_{2.1}$ ) antara  $X_{2.1}$  dengan  $\hat{Y}_2$  memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,78 di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti koefisien regresi ( $b_{2.1}$ ) tidak signifikan yang juga berarti bahwa Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak ( $X_{2.1}$ ) tidak secara signifikan mempengaruhi nilai Ketidakmampuan Membayar Wajib Pajak ( $\hat{Y}_2$ ). Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa koefisien beta ( $b_{2.2}$ ) antara  $X_{2.2}$  dengan  $\hat{Y}_2$  memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,675 di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti koefisien regresi  $b_{2.2}$  tidak signifikan dan Rasio

PBB terhadap Penghasilan Bersih Wajib Pajak ( $X_{2.2}$ ) tidak secara signifikan mempengaruhi nilai Ketidakmampuan membayar Wajib Pajak ( $\hat{Y}_2$ ).

Dari perhitungan SPSS atas koefisien determinasi ( $R^2$ ) atas persamaan (7) seperti yang terlihat pada tabel 4.22 kolom “*R Square*” yang menyatakan nilai koefisien determinasi hanyalah 0,003 berarti persamaan regresi hanya dapat diandalkan (*valid*) sebesar 0,3% dalam mencerminkan data. Nilai koefisien determinasi lebih mendekati nilai 0 daripada nilai 1 yang berarti tingkat eror persamaan regresi sangat tinggi sehingga korelasi variabel independen ( $X_{2.1}$  dan  $X_{2.2}$ ) dengan variabel dependen ( $\hat{Y}_2$ ) sangatlah lemah.

Demikian pula dengan uji Anova atas kesesuaian persamaan (7) pada tabel 4.22 menyatakan F hitung sebesar 0,131 dengan tingkat signifikansi 0,878 (di atas 0,05). Nilai F hitung ini menyatakan model regresi tidak lulus uji Anova dan tidak bisa dipakai untuk memprediksi nilai variabel dependen.

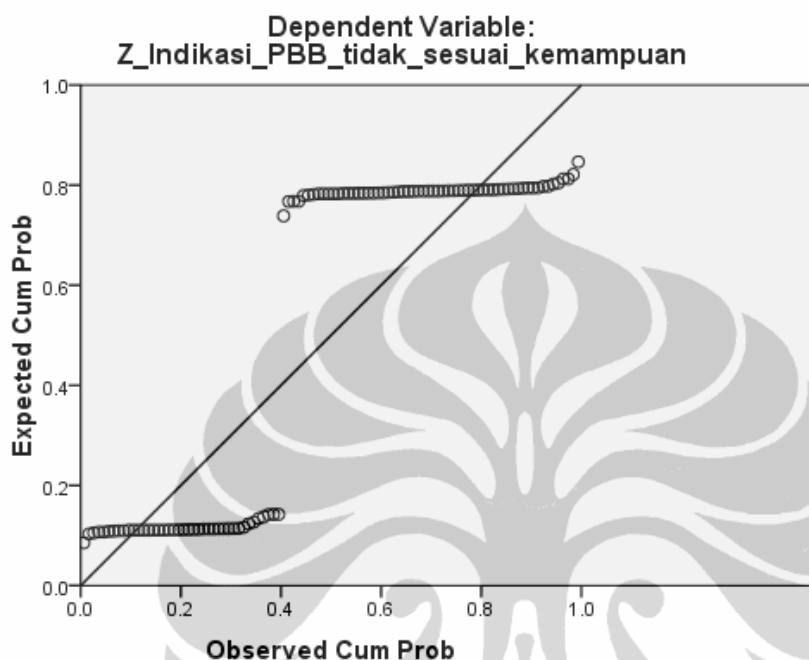
**Tabel 4.22. Hasil Perhitungan SPSS atas koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji Anova (*F-test*) untuk model regresi  $\hat{Y}_2 = 6,393 + 0,028 X_{2.1} - 0,043 X_{2.2}$**

Model Summary <sup>b</sup>						
Change Statistics						
Model	R Square Change	F Change	Df1	df2	Sig. F Change	
1	.003	.131	2	97	.878	
ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.219	2	2.609	.131	.878 <sup>a</sup>
	Residual	1938.781	97	19.987		
	Total	1944.000	99			
a. Predictors: (Constant), $X_{2.1}$ , $X_{2.2}$						
b. Dependent Variable: $\hat{Y}_2$						

Pada gambar 4.8, terlihat bahwa dilihat persamaan (7) membentuk titik-titik plot yang sangat jauh dari membentuk suatu garis regresi. Garis regresi hanya terhubung pada beberapa titik saja di atas dan di bawah garis. Hal ini

menunjukkan bahwa persamaan (7) memang tidak dapat diandalkan (valid) sebagai menghitung korelasi antar variabel dalam persamaan tersebut.

**Gambar 4.8. Gambar Normal P-Plot dari Garis Regresi dari persamaan  $\hat{Y}_2 = 6,393 + 0,028 X_{2.1} - 0,043 X_{2.2}$**



**Tabel 4.23. Hasil Perhitungan SPSS atas Analisa *Casewise Diagnostics* untuk model regresi  $\hat{Y}_2 = 6,393 + 0,028 X_{2.1} - 0,043 X_{2.2}$**

Case Number	$\hat{Y}_2$	Predicted Value	Residual	$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$\hat{Y}_1$
4*	1.00	65.109	-551.087	0,11	385,71	175.000
5*	1.00	63.862	-538.624	0,10	7.300	175.000
6*	1.00	58.857	-488.570	0,10	37.100	50.000
10*	1.00	57.884	-478.839	0,02	37.300	50.000
20*	1.00	61.830	-518.302	0,00	12.746,15	325.000
22*	10.00	54.322	456.781	0,10	64.100	50.000
23*	1.00	59.511	-495.108	0,03	28.300	50.000
24*	1.00	63.325	-533.248	0,08	8.985,71	175.000
25*	1.00	64.307	-543.072	0,10	4.671,43	175.000
28*	1.00	64.706	-547.061	0,12	3.862,50	400.000
29*	1.00	61.056	-510.561	0,03	19.100	50.000
32*	1.00	64.385	-543.855	0,10	4.185,71	175.000
37*	1.00	65.605	-556.053	0,35	14.100	175.000
38*	1.00	64.702	-547.022	0,10	2.300	325.000
54*	1.00	57.921	-479.214	0,03	37.800	50.000
57	1.00	65.954	-559.539	0,18	1,02	175.000
59*	1.00	71.238	-612.380	0,65	1.176,92	325.000
60*	1.00	57.869	-478.686	0,05	39.614,29	175.000
61	1.00	64.116	-541.163	0,02	7,22	325.000

Case Number	$\hat{Y}_2$	Predicted Value	Residual	X <sub>2.1</sub>	X <sub>2.2</sub>	$\hat{Y}_1$
62	1.00	64.021	-540.208	0,01	6,28	700.000
63	1.00	64.685	-546.851	0,07	1,02	175.000
64	1.00	65.246	-552.457	0,11	1,52	175.000
65*	1.00	66.539	-565.391	0,33	6.823,08	325.000
67	1.00	64.978	-549.781	0,09	2,47	275.000
77	1.00	64.665	-546.647	0,06	1,46	325.000
78	1.00	64.524	-545.241	0,05	0,33	175.000
80	1.00	64.694	-546.937	0,07	0,29	175.000
81	1.00	64.544	-545.445	0,05	0,24	133.333,33
83	1.00	64.545	-545.453	0,05	1,01	225.000
88	1.00	64.674	-546.736	0,06	0,35	175.000
89	1.00	65.583	-555.831	0,14	0,47	175.000
90	1.00	64.168	-541.677	0,02	23,95	1.233.333,33
91	1.00	64.104	-541.044	0,01	4,27	3.000.000
92	1.00	64.044	-540.436	0,01	1,38	966.666,67
93	1.00	64.688	-546.880	0,07	2,17	7.000.000
95	1.00	64.411	-544.114	0,04	9,97	7.000.000
96	1.00	63.963	-539.634	0,00	0,54	700.000
97	1.00	64.645	-546.450	0,06	0,22	261.666,67
98	1.00	63.987	-539.869	0,00	0,028	325.000
99	1.00	64.934	-549.344	0,09	2,73	3.000.000
100	1.00	64.320	-543.204	0,03	0,72	575.000

Berdasarkan analisa *casewise diagnostics* yang diproduksi SPSS seperti pada tabel 4.23, ketidakakuratan rumus regresi disebabkan oleh 41 data responden yang bermasalah. Dari data responden tersebut, terlihat bahwa kurangnya korelasi rasio Beban PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>) dengan ketidakmampuan membayar Wajib Pajak ( $\hat{Y}_2$ ) disebabkan oleh 21 orang responden yang merasa tidak keberatan dengan tagihan PBB walaupun telah membebani lebih dari 6% penghasilannya. Bahkan terdapat 17 orang yang tidak keberatan atau 27,4% dari 62 orang yang beban PBB-nya telah membebani lebih dari 100% pendapatannya (data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.24). Hal ini kemungkinan karena jumlah tagihan PBB yang terutang tidak ada yang melebihi Rp. 500.000,-. (dapat dilihat pada responden dengan tanda \* pada tabel 4.23). Kemungkinan lainnya adalah Wajib Pajak membayar PBB dari penghasilan tidak terturnya seperti dari penjualan hartanya atau bantuan keuangan dari keluarga karena Penghasilan Bersih yang dihitung dalam penelitian ini hanya memperhitungkan penghasilan rutin bulanan selama setahun seperti gaji, laba usaha, penghasilan rata-rata dari kerja serabutan, dan penghasilan rutin lainnya.

**Tabel 4.24. Data Responden yang tidak bermasalah dengan tagihan PBB ditinjau dari Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih (X<sub>2.2</sub>)**

%PBB terhadap Penghasilan Bersih	Responden yang tidak bermasalah dengan tagihan PBB		Responden yang mengeluh soal ketidakmampuan membayar		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Beban PBB menagih kurang dari 1% penghasilan bersih setahun	9	81,8%	2	18,2%	11
Beban PBB menagih 1-5% penghasilan bersih setahun	10	62,5%	6	37,5%	16
Beban PBB menagih 6-10% penghasilan bersih setahun	3	60,0%	2	40,0%	5
Beban PBB menagih 11%-100% penghasilan bersih setahun	1	16,7%	5	83,3%	6
Beban PBB menagih lebih dari 100% penghasilan bersih setahun	17	27,4%	45	72,6%	62
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40,0%</b>	<b>60</b>	<b>60,0%</b>	<b>100</b>

Di sisi lain, kurangnya korelasi Rasio Beban PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>) dengan Ketidakmampuan Membayar Wajib Pajak ( $\hat{Y}_2$ ) disebabkan karena jumlah responden yang tidak bermasalah dengan kemampuan bayar tidak tergantung pada Rasio Beban PBB terhadap Kekayaan bersih. Pada tabel 4.25, dapat kita lihat bahwa untuk rasio yang sama yaitu di bawah 0,1%, terdapat perbedaan yang mencolok antara responden yang tidak bermasalah dengan yang bermasalah dalam ketidakmampuan membayar PBB (38,3% berbanding 61,7%). Pada dasarnya Rasio Beban PBB terhadap Kekayaan Bersih tidak dapat dijadikan indikator ketidakmampuan membayar karena kekayaan Wajib Pajak berupa rumah, tanah, mobil dan perhiasan tidak terkait langsung dengan arus kas untuk membayar.

**Tabel 4.25. Data Responden yang tidak bermasalah dengan tagihan PBB ditinjau dari Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih (X<sub>2.1</sub>)**

%PBB terhadap kekayaan Bersih	Responden yang tidak bermasalah dengan tagihan PBB		Responden yang mengeluh soal ketidakmampuan membayar		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Beban PBB menagih kurang dari 0,1% kekayaan bersih setahun	31	38,3%	50	61,7%	81
Beban PBB menagih 0,1-0,5% kekayaan bersih setahun	8	47,1%	9	52,9%	17
Beban PBB menagih 0,6-1% kekayaan bersih setahun	1	50,0%	1	50,0%	2
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40,0%</b>	<b>60</b>	<b>60,0%</b>	<b>100</b>

#### 4.5. Hasil Uji Hipotesis

Dari pembahasan pada analisis statistika dan analisis regresi yang telah diterangkan sebelumnya, secara keseluruhan hipotesis yang diterima hanyalah hipotesis II yaitu beban PBB regresif terhadap Penghasilan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Hipotesis lain tidak dapat diterima sepenuhnya.

Hipotesis I yang menyatakan beban PBB regresif terhadap Kekayaan Bersih di Jakarta Selatan tidak bisa diterima karena hasil koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,667. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara PBB dan kekayaan bersih sehingga PBB progresif terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan.

Hipotesis III dan IV yang menyatakan kenaikan Rasio PBB terhadap kemampuan ekonomis (Kekayaan bersih dan Penghasilan bersih) meningkatkan angka Ketidakmampuan Membayar Wajib Pajak juga tidak dapat diterima karena persamaan regresi antara Ketidakmampuan Membayar Wajib Pajak dengan Rasio PBB terhadap Kekayaan Bersih dan Rasio PBB terhadap Penghasilan Bersih, tidak dapat diandalkan. Persamaan tersebut tidak lulus Uji Anova (*F-test*) dan memiliki koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil (0,3%). Rincian hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.26.



Tabel 4.26. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Simbol	Penjelasan	Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis I	Ho: $b_{1.1} < 0$	Ada korelasi negatif antara $X_{1.1}$ dan $\hat{Y}_1$ , beban PBB regresif terhadap kekayaan bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan	Ho ditolak, Ha diterima <b>Alasan:</b> Nilai $b_{1.1} = 0,667$ yang berarti $b_{1.1} \geq 0$ atau terdapat korelasi positif antara $X_{1.1}$ dan $\hat{Y}_1$ sehingga beban PBB progresif terhadap kekayaan bersih Wajib Pajak. Persamaan regresi yang dipakai untuk menguji korelasi antara $X_{1.1}$ dan $\hat{Y}_1$ telah lulus uji Anova dan memiliki koefisien determinasi 43,4% sehingga koefisien regresi dapat dinyatakan valid.
	Ha: $b_{1.1} \geq 0$	Tidak ada korelasi ataupun ada korelasi positif antara $X_{1.1}$ dan $\hat{Y}_1$ , beban PBB progresif terhadap kekayaan bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan ataupun tidak berkaitan sama sekali.	
Hipotesis II	Ho: $b_{1.2} < 0$	Ada korelasi negatif antara $X_{1.2}$ dan $\hat{Y}_1$ , beban PBB regresif terhadap penghasilan bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan	Ho diterima, Ha ditolak <b>Alasan:</b> Nilai $b_{1.2} = -0,021$ yang berarti $b_{1.2} < 0$ atau ada korelasi negatif antara $X_{1.2}$ dan $\hat{Y}_1$ sehingga beban PBB regresif terhadap penghasilan bersih Wajib Pajak. Persamaan regresi yang dipakai untuk menguji korelasi antara $X_{1.2}$ dan $\hat{Y}_1$ telah lulus uji Anova dan memiliki koefisien determinasi 43,4% sehingga koefisien regresi dapat dinyatakan valid.
	Ha: $b_{1.2} \geq 0$	Tidak ada korelasi ataupun ada korelasi positif antara $X_{1.2}$ dan $\hat{Y}_1$ , beban PBB progresif terhadap penghasilan bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan ataupun tidak berkaitan sama sekali.	

Hipotesis	Simbol	Penjelasan	Hasil Uji Hipótesis
Hipotesis III	Ho: $b_{2.1} > 0$	Ada korelasi positif antara $X_{2.1}$ dan $\hat{Y}_2$ , Kenaikan rasio beban PBB terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak menurunkan angka ketidakmampuan Wajib Pajak di Jakarta Selatan membayar PBB	<p>Ho ditolak, Ha diterima</p> <p><b>Alasan:</b> Persamaan regresi yang menguji korelasi antara <math>X_{2.1}</math> dan <math>\hat{Y}_2</math> tidak lulus uji Anova dan memiliki koefisien determinasi 0,3% yang nilainya lebih mendekati nilai 0 daripada 1 sehingga tidak ditemukan korelasi yang kuat antara <math>X_{2.1}</math> dan <math>\hat{Y}_2</math></p>
	Ha: $b_{2.1} \leq 0$	Tidak ada korelasi ataupun ada korelasi negatif antara $X_{2.1}$ dan $\hat{Y}_2$ . Kenaikan rasio beban PBB terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan tidak berpengaruh ataupun malah menurunkan angka ketidakmampuan Wajib Pajak membayar PBB	

Hipotesis	Simbol	Penjelasan	Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis IV	Ho: $b_{2.2} > 0$	Ada korelasi positif antara $X_{2.2}$ dan $\hat{Y}_2$ , Kenaikan rasio beban PBB terhadap Penghasilan Bersih Wajib Pajak menurunkan angka ketidakmampuan Wajib Pajak membayar PBB	Ho ditolak, Ha diterima  <b>Alasan:</b> Persamaan regresi yang menguji korelasi antara $X_{2.2}$ dan $\hat{Y}_2$ tidak lulus uji Anova dan memiliki koefisien determinasi 0,3% yang nilainya lebih mendekati nilai 0 daripada 1 sehingga tidak ditemukan korelasi yang kuat antara $X_{2.2}$ dan $\hat{Y}_2$ .
	Ha: $b_{2.2} \leq 0$	Tidak ada korelasi ataupun ada korelasi negatif antara $X_{2.2}$ dan $\hat{Y}_2$ . Kenaikan rasio beban PBB terhadap Penghasilan Bersih Wajib Pajak di Jakarta Selatan tidak berpengaruh ataupun malah menurunkan angka ketidakmampuan Wajib Pajak membayar PBB	